



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **UNDING**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **881144**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **960.300.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 384 m2/176 m2 di KAB / KOTA MUNA, HASIL SENDIRI Rp. 192.000.000
2. Tanah Seluas 355 m2 di KAB / KOTA MUNA, HASIL SENDIRI Rp. 177.500.000
3. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA MUNA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 2.571 m2 di KAB / KOTA MUNA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 128.550.000
5. Tanah Seluas 5.245 m2 di KAB / KOTA MUNA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 262.250.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **380.000.000**

1. MOBIL, HONDA MOBILIO RS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. MOBIL, HILI HILUX DO CBIN Tahun 2017, Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **50.000.000**

D. SURAT BERTAHAP **Rp.** **101.000**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **1.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **20.000.000**

Sub Total **Rp.** **1.411.401.000**

III. HUTANG **Rp.** **285.000.000**



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.126.401.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.